

**IMPLEMENTASI PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN
GEDONG MENENG, BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

M. FARIDZ PUTRA SILA

2456041048



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2025**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kualitas hidup yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kota yang bersih mencerminkan pengelolaan pemerintah yang baik serta kesadaran warga tentang pentingnya lingkungan. Dalam pembangunan kota, pengelolaan sampah menjadi masalah yang sulit karena berhubungan dengan isu sosial, ekonomi, teknologi, dan perilaku masyarakat.

Menurut *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024)*, Indonesia memproduksi lebih dari 70 juta ton sampah setiap tahun, di mana sebagian besar berasal dari rumah tangga (42%) dan pasar (15%). Dari total tersebut, sekitar 35–40% belum dikelola dengan baik, disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, sistem pengelolaan yang lemah, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Ini menunjukkan bahwa masalah kebersihan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mengarah pada pengelolaan dan perilaku sosial.

Kota Bandar Lampung, yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, menghadapi masalah serupa. Mengacu pada data *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2024*, populasi kota ini mencapai sekitar 1,17 juta dengan pertumbuhan 1,26% setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung (2024), jumlah sampah yang dihasilkan adalah 720 ton per hari, sedangkan kapasitas angkut hanya 560 ton per hari. Hal ini berarti ada sekitar 160 ton sampah per hari yang tidak terangkut dan bisa menumpuk di lingkungan sekitar seperti pemukiman, pasar, dan jalan. Situasi ini semakin buruk dengan adanya infrastruktur yang terbatas.

Di Kota Bandar Lampung, terdapat hanya sekitar 280 Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang aktif, padahal jumlah ideal diperkirakan sekitar 400 TPS untuk distribusi layanan yang lebih baik (DLH, 2024). Akibatnya, beberapa warga

terpaksa membuang sampah di tempat yang tidak sesuai seperti lahan kosong atau pinggir sungai. Hal ini berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan, penurunan keindahan kota, serta potensi munculnya penyakit akibat situasi yang tidak sehat.

Alasan tersebut juga terlihat di Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, yang merupakan daerah padat penduduk dan dikenal sebagai tempat tinggal mahasiswa Universitas Lampung. Berdasarkan pengamatan oleh DLH (2024), daerah ini menghasilkan sekitar 6–8 ton sampah per hari, tetapi tidak semuanya dapat diangkut dengan cepat karena keterbatasan alat dan tenaga kebersihan. Sementara itu, data dari Kelurahan Gedong Meneng (2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 70% rumah tangga yang rutin dilayani oleh petugas kebersihan.

Selain faktor teknis, kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan pengelolaan sampah masih rendah. Berdasarkan survei dari DLH Bandar Lampung (2023), hanya 26% responden yang memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah mereka. Ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih dalam mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dari segi kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran.

Dalam *laporan DLH (2024)*, tercatat bahwa petugas kebersihan hanya sekitar 1.200 orang untuk melayani 20 kecamatan dan 126 kelurahan, di mana rasio ideal seharusnya adalah 1 petugas untuk setiap 700 penduduk. Sementara itu, hanya ada 160 unit truk sampah yang tersedia, di mana 40% di antaranya sudah berusia lebih dari 10 tahun dan seringkali mengalami kerusakan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan program kebersihan. Sesuai dengan teori penerapan kebijakan publik dari *George C. Edwards III (1980)*, ada empat unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur administratif.

Di dalam konteks layanan kebersihan di Bandar Lampung, keempat unsur ini saling berhubungan dengan erat. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kelurahan, dan masyarakat sering kali kurang efisien, sehingga

informasi mengenai jadwal pengambilan atau kebijakan pemilahan sampah tidak tersampaikan dengan baik. Dari sisi sumber daya, terbatasnya jumlah armada dan staf menghalangi pelaksanaan kebijakan dengan baik. Di sisi lain, disposisi atau sikap petugas di lapangan juga bervariasi beberapa bekerja dengan disiplin dan responsif, tetapi ada pula yang menunjukkan motivasi yang rendah akibat kurangnya insentif dan pengawasan.

Selain itu, struktur birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga memperlambat respon terhadap isu kebersihan. *Wahab (2018)* menekankan bahwa koordinasi yang lemah antar lembaga adalah faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan kebijakan publik di Indonesia. Hal ini jelas terlihat di Bandar Lampung, di mana kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, dan masyarakat belum berjalan secara sinergis. Akibatnya, inisiatif seperti Bank Sampah dan Gerakan Lampung Bersih belum dapat berjalan secara berkelanjutan.

Masalah dalam pengelolaan sampah di Gedong Meneng tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga bagaimana interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat terbentuk. Mengacu pada konsep birokrasi tingkat jalan dari *Lipsky (2010)*, birokrat lapangan seperti petugas kebersihan memiliki peran kunci dalam menjelaskan bagaimana kebijakan diimplementasikan secara nyata. Mereka berinteraksi langsung dengan warga dan harus membuat keputusan dengan cepat meskipun dengan sarana yang terbatas. Kebijakan diskresi petugas bisa bermanfaat jika digunakan untuk mempercepat layanan, tetapi bisa juga menjadi masalah jika tidak ada pengawasan yang membimbing.

Isu lain yang juga penting yaitu pengelolaan anggaran untuk kebersihan. Berdasarkan laporan mengenai pelaksanaan anggaran dari *Dinas Lingkungan Hidup (2024)*, dana yang dialokasikan untuk kebersihan hanya sekitar Rp 78 miliar per tahun, dengan sebagian besar (60%) dialokasikan untuk operasi angkutan dan pemeliharaan armada. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit ruang fiskal untuk inovasi seperti program edukasi publik, pengelolaan bank sampah, dan daur ulang. Padahal, menurut *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)* poin ke-11, kota

yang berkelanjutan harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien dan melibatkan masyarakat.

Kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran bersama dan partisipasi aktif dari warga, berbagai kebijakan kebersihan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, petugas kebersihan, perangkat kelurahan, dan masyarakat demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Melihat penjelasan di atas, penelitian ini memiliki pentingnya untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan sampah dan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Dengan menerapkan teori implementasi kebijakan dari *George C. Edwards III*, diharapkan penelitian ini menghasilkan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan kebersihan di tingkat lokal serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, berikut adalah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi pelayanan sampah dan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi pelayanan sampah dan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Gedong Meneng?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sampah dan kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelayanan sampah dan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelayanan sampah dan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Gedong Meneng.
3. Untuk mengidentifikasi strategi peningkatan efektivitas pelayanan sampah dan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Gedong Meneng.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang ilmu administrasi publik, khususnya pada aspek pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Dengan menerapkan teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh *George C. Edwards III*, studi ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam penyempurnaan pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan di level lokal, khususnya terkait dengan layanan kebersihan dan manajemen sampah di area perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi serta masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng. Di samping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan akademika dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang isu, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjadi fondasi untuk memahami arah dan konteks dari penelitian.
2. Bab II Kajian Pustaka Bagian ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yang mencakup konsep pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, serta teori pelaksanaan menurut *George C. Edwards III*. Selain itu, bagian ini juga mencakup hasil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan.
3. Bab III Metode Penelitian, bagian ini menguraikan pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan kualitatif dengan fokus pada pelaksanaan layanan kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng. Di dalamnya dijelaskan mengenai tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik adalah langkah penting setelah kebijakan disusun dan disetujui. Tanpa adanya pelaksanaan yang memadai, kebijakan tidak akan memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Menurut *Van Meter* dan *Van Horn (1975)* dalam buku *The Policy Implementation Process*, pelaksanaan merujuk pada tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dari sektor pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam kebijakan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep pelaksanaan kebijakan tidak hanya sebatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan interaksi antara para aktor yang berpartisipasi dalam proses ini (*Subarsono, 2017*).

Menurut *Nugroho (2017)*, pelaksanaan kebijakan adalah usaha untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Proses ini memerlukan adanya koordinasi antara pembuat kebijakan (*policy makers*) dan pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Dalam layanan publik, ketidakefektifan pelaksanaan seringkali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya, serta penolakan dari pelaksana di lapangan.

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana pelaksana memahami kebijakan; sumber daya berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, dana, dan fasilitas; disposisi mencerminkan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi dan prosedur yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Keempat faktor ini membentuk sebuah kerangka analisis yang

komprehensif untuk memahami seberapa efektif pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam konteks layanan publik, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari peran birokrat tingkat bawah atau *street-level bureaucrats*, yaitu pelaksana yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurut *Lipsky (2010)*, para birokrat lapangan ini memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan karena mereka yang mengartikan dan menyesuaikan peraturan dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada cara mereka memahami, menginterpretasikan, dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan publik masih menghadapi banyak tantangan seperti regulasi yang tumpang tindih, keterbatasan anggaran, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Menurut *Widodo (2020)*, permasalahan dalam pelaksanaan sering kali disebabkan oleh jurang antara desain kebijakan yang ideal dan realitas sosial di lapangan. Hal ini sering terjadi di layanan publik di tingkat daerah, di mana kapasitas birokrasi dan partisipasi masyarakat sering kali tidak seimbang.

Berdasarkan pandangan ini, studi tentang pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan layanan sampah dan kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng. Pelaksanaan dievaluasi melalui empat dimensi utama yang telah diuraikan oleh *Edwards III*, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2.1.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah wujud dari kelembagaan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009* mengenai *Pelayanan Publik*, pelayanan publik diartikan sebagai aktivitas atau serangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan hukum untuk setiap orang dan penduduk terkait barang, jasa, serta pelayanan administratif.

Ratminto dan Winarsih (2016) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala jenis aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menjalankan hukum. Dalam praktiknya, pelayanan publik melibatkan berbagai sektor seperti administrasi penduduk, pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan modern, pelayanan publik memerlukan transparansi, efisiensi, dan responsif terhadap keinginan masyarakat. Menurut *Hardiansyah (2018)*, pelayanan publik yang berkualitas harus mencerminkan tiga asas pokok, yaitu responsivitas (cepat tanggap terhadap keinginan masyarakat), tanggung jawab (bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas), dan akuntabilitas (mempertanggungjawabkan hasil pelayanan).

Pelayanan kebersihan adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang langsung mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. *Mardiasmo (2019)* menyatakan bahwa pelayanan kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sebab itu, keberhasilan program kebersihan sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pelayanan kebersihan termasuk dalam layanan publik yang sangat penting karena terkait langsung dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Efektivitas layanan ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduknya.

2.1.3 Konsep Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Kebersihan lingkungan adalah indikator yang sangat penting untuk menilai kualitas hidup warga di kota. Pengelolaan limbah, sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008* mengenai *Pengelolaan Sampah*, terdiri dari kegiatan yang terorganisir, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang

mencakup pengurangan dan perlakuan limbah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi kualitas lingkungan.

Setiadi (2019) menyatakan bahwa pengelolaan limbah yang efisien seharusnya didasarkan pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang menekankan pada pengurangan limbah dari sumbernya, pemanfaatan ulang barang yang tidak terpakai, dan proses daur ulang. Namun, keberhasilan dalam menerapkan prinsip ini sangat tergantung pada perilaku masyarakat dan dukungan dari sistem pelayanan pemerintahan lokal.

Dalam penerapannya, tantangan utama dalam pengelolaan limbah di area perkotaan seperti Bandar Lampung adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kurangnya kendaraan angkut, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia di sektor kebersihan (*Rahmadani, 2020*). Ini menunjukkan perlunya penerapan kebijakan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga edukatif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

2.1.4 Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelayanan Kebersihan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga teknis daerah memiliki posisi penting dalam mempertahankan kebersihan kota melalui pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan pengendalian pencemaran. Sesuai dengan *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2019* mengenai *Pembentukan Perangkat Daerah*, DLH bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan kebersihan.

Menurut *Siregar (2021)*, DLH berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan penggerak perubahan perilaku masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berkutat pada aspek teknis pengangkutan limbah, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar turut aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesuksesan pelaksanaan layanan kebersihan oleh DLH di Kelurahan Gedong Meneng sangat tergantung pada efektivitas

koordinasi internal (antara pegawai dan petugas di lapangan), ketersediaan fasilitas kebersihan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program kebersihan lingkungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya sangat diperlukan untuk memahami bagaimana tema pelaksanaan kebijakan mengenai pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah telah diteliti sebelumnya, baik dari segi teori maupun praktik. Selain itu, analisis ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian yang menjadi dasar penting bagi studi di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung.

Studi yang dilakukan oleh *Putra dan Wahyuni (2018)* berjudul "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palembang*" mengungkapkan bahwa komunikasi dan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan. Keterbatasan armada pengangkut serta koordinasi antar lembaga membuat pelayanan kebersihan belum optimal. Temuan ini menegaskan betapa pentingnya faktor sumber daya sesuai dengan teori *Edwards III*.

Di lain sisi, *Rahmadani (2020)* dalam penelitiannya berjudul "*Evaluasi Implementasi Kebijakan Kebersihan di Kota Medan*" menekankan lemahnya komitmen dari pelaksana lapangan dalam menjaga konsistensi kebijakan. Penelitian ini menekankan bahwa sikap aparaturnya sangat mempengaruhi kualitas layanan publik. Hasil ini relevan untuk konteks Bandar Lampung, di mana motivasi petugas kebersihan dan pengawasan sering menjadi kendala dalam pelaksanaan.

Selanjutnya, penelitian oleh *Siregar dan Hidayat (2021)* di *Jurnal Administrasi Publik* mengkaji "*Efektivitas Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar*". Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih minim karena sosialisasi yang kurang dari dinas terkait. Faktor komunikasi dalam kebijakan, sesuai dengan teori *Edwards III*, terbukti menjadi kunci dalam

keberhasilan pelayanan kebersihan. Penelitian ini relevan untuk membandingkan tingkat partisipasi masyarakat di Gedong Meneng.

Selain itu, *Fitriani (2019)* dalam penelitiannya berjudul "*Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Yogyakarta*" menegaskan bahwa peran koordinatif DLH dengan masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan. DLH tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknik tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku lingkungan. Temuan ini sangat penting untuk mengevaluasi peran DLH Bandar Lampung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Gedong Meneng tentang kebersihan lingkungan.

Penelitian oleh *Nugroho dan Santoso (2017)* di *Jurnal Kebijakan Publik* juga menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sampah dipengaruhi oleh dukungan politik lokal dan transparansi dalam penganggaran. Tanpa dukungan ini, implementasi kebijakan sering kali tidak berkelanjutan. Ini sangat relevan karena permasalahan anggaran dan alokasi sumber daya di tingkat kelurahan sering kali terbatas.

Studi *Hardiansyah (2018)* mengkaji "*Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bekasi*" dan mengungkapkan bahwa kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan waktu petugas dalam mengangkat sampah. Ini menunjukkan bahwa aspek teknis pelayanan perlu mendapat perhatian lebih pada saat evaluasi implementasi kebijakan kebersihan.

Sementara itu, penelitian oleh *Wibowo (2020)* dengan judul "*Analisis Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas*" mengungkapkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tergantung pada kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ia menekankan perlunya kemitraan lintas sektor untuk mencapai efektivitas program kebersihan.

Selain studi dalam negeri, penelitian internasional seperti yang dilakukan oleh *Wilson et al. (2019)* dalam *Waste Management Journal* membahas pengelolaan sampah di kota-kota besar di negara-negara berkembang, termasuk pentingnya kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu,

Challcharoenwattana dan *Pharino* (2018) dalam *Journal of Cleaner Production* menunjukkan bahwa strategi kebersihan yang berkelanjutan di Thailand berhasil berkat kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh *Pratiwi* (2022) dengan judul “*Penerapan Kebijakan Kebersihan di Kota Bandar Lampung*” menunjukkan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan kelurahan. Penelitian ini secara langsung mendukung relevansi penelitian ini karena menyoroti konteks lokal yang sama, meskipun belum melakukan kajian spesifik di wilayah Gedong Meneng.

Dari berbagai penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan pelayanan kebersihan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam teori *Edwards III*, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, sebagian besar penelitian masih menyoroti skala kota secara umum, sementara penelitian mendalam di tingkat kelurahan terutama di Gedong Meneng masih jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran penting dalam memberikan wawasan mikro mengenai penerapan kebijakan pelayanan kebersihan di tingkat lokal.

2.3 Kerangka Berfikir

Pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya berlangsung pada tahap perumusan di pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara kebijakan itu diterapkan di lapangan. Menurut *George C. Edwards III* (1980), keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan pelaksana untuk mengubah keputusan politik menjadi tindakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Proses implementasi ini bersifat dinamis dan tidak mekanis, karena melibatkan berbagai elemen seperti komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), serta struktur birokrasi. Empat elemen ini saling berinteraksi dan menentukan seberapa efektif suatu kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, kebijakan yang dibahas adalah pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang diadakan oleh *Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota*

Bandar Lampung. Kebijakan ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan menciptakan tata kota yang sehat. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat. Namun, di lapangan seringkali timbul bermacam-macam masalah teknis, kelembagaan, dan sosial. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini digunakan untuk mengeksplorasi sejauh mana faktor-faktor dalam *teori Edwards III* berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Menurut *Edwards III*, terdapat empat faktor utama yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik:

1. *Komunikasi (Communication)* Komunikasi memiliki peranan penting dalam memastikan pesan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh semua pelaksana. Informasi yang disampaikan dari pemerintah kota ke DLH, kemudian dari DLH ke kelurahan dan selanjutnya kepada masyarakat harus jelas, terbuka, dan tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Dalam praktiknya, hambatan komunikasi sering muncul karena kurangnya koordinasi antara instansi, penyampaian informasi yang tidak efektif, atau sosialisasi kebijakan yang kurang kepada masyarakat. Di Kelurahan Gedong Meneng, komunikasi yang tidak terarah antara petugas lapangan dan warga dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai jadwal pengangkutan sampah, proses pemilahan, ataupun sanksi bagi pelanggaran kebersihan.
2. *Sumber Daya (Resources)* Ketersediaan sumber daya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup manusia, fasilitas, anggaran, serta informasi yang mendukung. Dalam hal ini, DLH Kota Bandar Lampung menghadapi keterbatasan dalam hal armada angkut, tenaga kebersihan, dan tempat pembuangan sementara (TPS). Berdasarkan data DLH (2024), jumlah truk sampah aktif hanya sekitar 160 unit, sementara kebutuhan yang ideal mencapai 220 unit. Selain itu, jumlah petugas kebersihan yang ada masih kurang untuk melayani seluruh wilayah

kelurahan. Kekurangan sumber daya ini mempengaruhi efektivitas pengangkutan dan distribusi layanan kebersihan di Gedong Meneng.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*) Faktor disposisi terkait dengan sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Keberhasilan dalam implementasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan struktur yang ada, tetapi juga oleh keinginan petugas di lapangan untuk melaksanakan tugas dengan serius. Petugas yang memiliki etos kerja tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab publik akan lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebaliknya, jika pelaksana bersikap pasif, kurang disiplin, atau tidak punya motivasi yang kuat, maka hasil kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Di Bandar Lampung, beberapa petugas menunjukkan inisiatif dengan melakukan pengangkutan sampah di luar jadwal untuk menghindari penumpukan, namun ada juga yang hanya bekerja seadanya karena kurangnya insentif serta pengawasan.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) Struktur organisasi yang jelas, penugasan yang tegas, serta sistem koordinasi yang efisien merupakan syarat penting untuk penerapan kebijakan. Menurut teori *Edwards*, birokrasi yang terlalu panjang dan berlapis dapat menghambat aliran informasi dan memperlambat pengambilan keputusan. Di DLH Kota Bandar Lampung, kerjasama antara pemerintah kota, kelurahan, dan petugas lapangan masih belum maksimal. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan kebersihan seringkali tidak merata di berbagai daerah. Selain itu, pengawasan dan evaluasi internal yang lemah mengakibatkan proses tindak lanjut terhadap pelanggaran atau pengabaian pekerjaan belum efektif.

Keempat faktor tersebut saling terkait secara sistemik. Komunikasi yang baik akan berdampak pada motivasi pelaksana; sumber daya yang memadai akan mendukung semangat kerja; dan birokrasi yang efisien akan memudahkan koordinasi serta penyebaran informasi. Sebaliknya, jika salah satu faktor melemah, maka penerapan kebijakan secara keseluruhan akan terganggu. Contohnya, adanya armada pengumpulan sampah tanpa adanya komunikasi yang efektif dengan

masyarakat tidak akan mendorong mereka untuk mengubah perilaku dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di Kelurahan Gedong Meneng, aspek sosial masyarakat juga berperan penting. Rendahnya kesadaran warga dalam memilah dan membuang sampah dengan benar merupakan kendala tersendiri bagi keberhasilan kebijakan kebersihan. Berdasarkan survei DLH (2023), hanya sekitar 26% warga yang menerapkan pemisahan sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan kolaboratif antara petugas DLH, perangkat kelurahan, dan tokoh masyarakat setempat.

Secara konseptual, penelitian ini berlandaskan pada anggapan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan kebersihan bergantung pada keharmonisan antara empat variabel dalam teori *Edwards III* komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika komunikasi berjalan baik, sumber daya memadai, sikap pelaksana bersifat positif, dan struktur organisasi mendukung proses koordinasi, maka kualitas pelayanan kebersihan di tingkat kelurahan akan meningkat. Namun, apabila salah satu faktor terganggu, maka kebijakan tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan masyarakat yang menyadari pentingnya kebersihan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memberikan landasan logis bahwa penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kontribusi masing-masing faktor terhadap keberhasilan atau tantangan dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan di wilayah yang diteliti. Hasil dari analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kebersihan yang berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami proses pelaksanaan layanan sampah dan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung.

Menurut *Creswell (2018)*, metode kualitatif digunakan saat peneliti ingin memahami arti dari fenomena sosial yang dialami oleh individu atau kelompok dalam suasana alami. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai cara kebijakan kebersihan diimplementasikan di lapangan, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya, serta pandangan masyarakat tentang efektivitas layanan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan *Moleong (2019)*, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan factual tentang faktafakta serta karakteristik objek yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan layanan kebersihan diterapkan, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel atau memberikan perlakuan tertentu.

Oleh karena itu, studi ini lebih menekankan pada proses, makna, dan konteks sosial ketimbang angka-angka statistik. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap individu yang terlibat dalam pelaksanaan layanan kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan di Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah dengan populasi yang padat dan tingkat produksi sampah rumah tangga yang cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan awal, daerah ini menghadapi masalah dalam sistem

pengangkutan serta pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya efisien, sehingga menjadi subjek yang relevan untuk diteliti dari sudut pandang pelaksanaan kebijakan kebersihan.

Sesuai dengan data dari *Dinas Lingkungan Hidup (2024)*, jumlah tim kebersihan yang ada di area Gedong Meneng sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi seberapa baik pelaksanaan kebijakan kebersihan dilakukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, dari Oktober sampai November 2025, dan meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan laporan hasil penelitian

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan layanan kebersihan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung. Penekanan diberikan pada proses pelaksanaan kebijakan, efektivitas program, serta tantangan dan strategi yang diterapkan di lapangan. Merujuk pada teori implementasi kebijakan *George C. Edwards III (1980)*, fokus penelitian ini terbagi menjadi empat aspek penting, yaitu:

1. Komunikasi, yang mencakup bagaimana kebijakan dan instruksi terkait pengelolaan sampah serta kebersihan disampaikan dari DLH kepada aparat pelaksana di tingkat kelurahan dan masyarakat. Fokus ini mencakup bentuk sosialisasi, tingkat pemahaman, dan interaksi antaraktor kebijakan.
2. Sumber Daya, yang menekankan ketersediaan fasilitas, infrastruktur, tenaga kerja, dan dukungan anggaran untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan layanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Gedong Meneng.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana, yang menilai komitmen, motivasi, dan tanggapan petugas DLH serta staf kebersihan terhadap pelaksanaan kebijakan kebersihan. Fokus ini juga menyelidiki sejauh mana nilai, etika, dan tanggung jawab aparat mempengaruhi kualitas layanan publik.

4. Struktur Birokrasi, yang mencakup mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan sistem pengawasan dalam implementasi kebijakan kebersihan. Aspek ini juga menelaah seberapa baik struktur organisasi DLH dan pemerintah kelurahan dapat mendukung efektivitas layanan publik.

Selain keempat aspek tersebut, penelitian ini juga menyoroti partisipasi masyarakat sebagai faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan kebersihan. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesadaran pemilahan sampah, dan kepatuhan terhadap jadwal pengumpulan sampah merupakan elemen penting yang berpengaruh pada efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana kebijakan layanan kebersihan dan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh DLH di tingkat kelurahan, tantangan yang dihadapi, serta usaha pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kelurahan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap staf Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, serta warga di Kelurahan Gedong Meneng. Menurut *Sugiyono (2019)*, data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber aslinya melalui pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan fakta terbaru tentang fenomena yang sedang diteliti.

Data Sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, peraturan daerah terkait kebersihan, arsip kegiatan kebersihan di kelurahan, serta data statistik lingkungan yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur akademis, seperti buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan melalui metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki informasi relevan dengan pokok penelitian *Miles, Huberman, & Saldaña, (2018)*. Informan yang terlibat dalam penelitian ini mencakup:

1. Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, yang bertanggung jawab secara teknis untuk pelaksanaan kebersihan kota.
2. Staf lapangan atau petugas kebersihan, yang berperan langsung dalam pengumpulan dan pengelolaan sampah di area Gedong Meneng.
3. Perangkat kelurahan (Lurah dan staf) yang bekerja sama dengan DLH dalam melaksanakan kegiatan kebersihan di tingkat lokal.
4. Tokoh masyarakat dan warga Gedong Meneng, sebagai penerima layanan serta mitra dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*), yaitu situasi ketika data yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada informasi baru yang muncul (*Moleong, 2019*).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi ini mencakup:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung pada kegiatan kebersihan, seperti proses pengangkutan limbah, aktivitas petugas, serta kondisi fasilitas di Kelurahan Gedong Meneng. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan.
2. Wawancara Mendalam, dilakukan dengan format semi-terstruktur kepada informan penting. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai pandangan, tantangan, dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan. Pertanyaan diarahkan untuk menyelidiki empat faktor utama dalam teori *Edwards III*, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Dokumentasi, mengumpulkan berbagai dokumen resmi, seperti data mengenai volume limbah, laporan aktivitas kebersihan, peraturan daerah, serta foto-foto kegiatan di lapangan. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara interaktif dan terus-menerus, mengikuti model analisis kualitatif yang diajukan oleh *Miles, Huberman, dan Saldaña (2018)*, yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Pengurangan Data, tahap ini mencakup proses pemilihan, penyederhanaan, dan fokus pada data yang penting untuk pencapaian tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dipilih untuk mengidentifikasi pola-pola penting yang berhubungan dengan penerapan kebijakan kebersihan.
2. Tampilan Data, data yang sudah direduksi diatur dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks yang membantu peneliti dalam memahami hubungan antara variabel, contohnya antara komunikasi dan efektivitas layanan kebersihan.
3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi, pada tahap akhir ini, tujuan utamanya adalah untuk mengartikan makna data secara menyeluruh, menghubungkannya dengan teori *Edwards III*, dan menarik kesimpulan tentang efektivitas penerapan layanan kebersihan di Kelurahan Gedong Meneng.

3.8 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan kevalidan data, studi ini mengaplikasikan teknik triangulasi dari sumber dan metode. Menurut *Moleong (2019)*, triangulasi adalah pendekatan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan output dari berbagai sumber dan cara pengumpulan.

Triangulasi Sumber dilakukan dengan mengontraskan informasi yang didapat dari informan yang berbeda, seperti staf kebersihan, petugas kelurahan, dan masyarakat. Triangulasi Metode dilakukan dengan menggabungkan hasil dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk memastikan data yang konsisten.

Di samping itu, peneliti juga menerapkan pemeriksaan anggota, yang berarti meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil interpretasi peneliti, untuk memastikan kebenaran dan ketepatan data yang diperoleh.

3.9 Etika Penelitian

Studi ini mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam penelitian, seperti menghargai privasi para responden, melindungi kerahasiaan identitas, dan memanfaatkan data hanya untuk keperluan akademik. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menjelaskan tujuan dari penelitian dan meminta izin dari responden. Prinsip etika ini sejalan dengan pedoman penelitian sosial yang diuraikan oleh *Creswell (2018)*, yang menekankan pentingnya persetujuan yang diinformasikan, kerahasiaan, dan partisipasi sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ansell, C., & Torfing, J. (Eds.). (2021). *Public administration and public policy in the post-pandemic era*. Routledge.
- Arifin, M., & Siregar, R. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 145–158.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards, G. C. (2018). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fahmi, M. R., & Wahyuni, D. (2020). Pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(3), 187–199.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, A. (2020). *Birokrasi publik di Indonesia: Perspektif reformasi dan good governance*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lipsky, M. (2019). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahsyar, A. (2022). *Manajemen pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat*. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Manan, B., & Rahman, H. (2019). Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di daerah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 5(1), 22–34.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nuraini, S., & Rahmat, M. (2021). Analisis implementasi kebijakan kebersihan lingkungan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 12(1), 33–47.
- Rahardjo, M. (2019). *Metodologi penelitian sosial kualitatif*. Malang: UIN Press.
- Raharjo, A., & Santoso, D. (2018). Kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 95–108.
- Sari, I. P., & Putra, B. W. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah perkotaan: Studi pada program bank sampah. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 120–135.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. (2023). *Tata kelola lingkungan dan kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, T. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan kebersihan lingkungan di kawasan padat penduduk. *Jurnal Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 8(1), 77–89.